

PENYEBARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA MELALUI PENGAJARAN BIPA DAN EKSPEDISI BUDAYA

Liliana Muliastuti*

*Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta
Ketua Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA) 2015-2019
Pos-el: lmuliastuti@yahoo.com

Abstrak

Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional harus dilakukan dengan perencanaan matang. Berbagai program telah dilakukan pemerintah, organisasi profesi, dan perorangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya. Program profesionalisme para pengajar BIPA harus dapat diwujudkan melalui ketersediaan program pendidikan pengajar BIPA dan lembaga sertifikasi profesi pengajar BIPA. Keberhasilan internasionalisasi bahasa Indonesia sesuai amanah UU No. 24 tahun 2009 perlu mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk para pelaku industri kreatif. Produk industri kreatif seperti film, drama televisi, animasi, dan industri musik Indonesia dapat menjadi magnet orang asing belajar bahasa Indonesia. Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia harus dilakukan secara bersinergi dengan produk budaya lainnya sehingga tercipta “gelombang Indonesia” (*Indonesia wave*).

Kata-kata kunci: BIPA, ekspedisi budaya, internasionalisasi bahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia membutuhkan sebuah **perencanaan bahasa**. Menurut Cooper dalam Siregar (2011), perencanaan bahasa sebagai bentuk atau kegiatan terencana yang memengaruhi bentuk dan penggunaan bahasa setidaknya dilakukan oleh unsur perorangan, lembaga pemerintah, dan berbagai komunitas seperti asosiasi profesi.

Perencanaan bahasa di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah perencanaan bahasa Indonesia. Pada tanggal tersebut kita menetapkan satu bahasa persatuan. Ikatan psikologis kebangsaan kita diikat dengan janji bahwa kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada momentum sejarah tersebut, bahasa Indonesia kita tetapkan menjadi bahasa nasional.

Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia meningkat sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Konstitusi kita ini memuat Bab XV Pasal 36 yang menyatakan “bahasa negara ialah bahasa Indonesia.” Kedudukan bahasa Indonesia pun diperkuat menjadi bahasa negara. Sejak

itu, baik pemerintah maupun masyarakat melakukan berbagai program kebahasaan yang membuat bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang. Dalam praktiknya, perencanaan bahasa akan selalu melibatkan tiga kegiatan penting: pembinaan, pengembangan, dan perlindungan.

Saat ini perencanaan bahasa Indonesia berada dalam lintasan sejarah penting karena menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang disahkan pada 9 Juli 2009 telah menetapkannya. Pasal 44 UU tersebut berbunyi:

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (1) pada pasal 44 tersebut mengingatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional harus dilakukan secara terencana. Artinya, program tersebut harus direncanakan dengan matang. Perencanaan bahasa yang matang sudah seharusnya melibatkan banyak pihak sehingga dapat memberikan masukan menyeluruh. Siapakah perencana dalam hal ini? Tentu saja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana disebut pada ayat (2). Badan Bahasa tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan perorangan, asosiasi profesi, dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait hal ini.

Mampukah kita mencapai amanah tersebut? Upaya apa saja yang telah dan harus dilakukan? Salah satu hal penting dan utama yang dapat dilakukan untuk mencapai amanah menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya. Makalah ini akan membahas hal tersebut.

PELUANG BAHASA INDONESIA

Hal yang harus disepakati pertama kali dalam perjuangan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah kesadaran bahwa kita melakukan kerja

kebudayaan yang besar dan membutuhkan dukungan semua pihak. Mungkinkah hal tersebut diwujudkan? Mungkin saja, sepanjang kita meyakini segala hal yang berkaitan dengan produk budaya kita, termasuk bahasa dan sastra Indonesia, layak dipromosikan untuk meraih pengakuan internasional.

Namun, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Semasa hidupnya, Indonesianis terkemuka Ben Anderson pernah mengemukakan pertanyaan penting beberapa tahun lalu: mengapa sejak Hadiah Nobel Sastra diberikan pada tahun 1901 (117 tahun lalu), Asia Tenggara menjadi satu-satunya kawasan besar di dunia yang belum mendapatkan giliran meraih hadiah prestisius tersebut?

Anderson membahas pertanyaan itu dalam esainya yang menarik, “Yang Luput dari Penghargaan: Politik Penganugerahan Hadiah Nobel Sastra” (www.sastraalibi.blogspot.com, diunduh pada 28 September 2018). Esai tersebut membahas berbagai kemungkinan perihal Hadiah Nobel Sastra, termasuk kemungkinan pilihan-pilihan subjektif dan selera penyelenggara. Untuk karya sastra dari Kawasan Asia Tenggara, Anderson memiliki pendapat menarik yang perlu kita kaji lebih jauh. Menurut Anderson, tidak satu pun bahasa nasional di Asia Tenggara punya aura transnasional. Faktor lainnya adalah keterbatasan penerjemahan berkualitas karya sastra ke dalam “bahasa-bahasa besar” dunia agar dibaca secara luas.

Dalam konteks Indonesia, secara khusus Ben Anderson mengambil contoh dua sastrawan besar Indonesia: Amir Hamzah dan Pramudya Ananta Toer. Keduanya memiliki karya yang luar biasa dan, pada zamannya, dapat bersaing dalam meraih Nobel Sastra. Hanya saja, semasa mereka hidup, karya-karya mereka belum mendapatkan sentuhan penerjemahan dengan kualitas yang diakui secara luas. Meskipun, dalam kasus Pramudya, karya-karyanya sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Peluang meraih Nobel Sastra pun luput karena hadiah tersebut hanya diberikan kepada sastrawan yang masih hidup.

“Satu alasan mengapa penulis-penulis besar Amerika Latin bisa mendapat Hadiah Nobel adalah adanya sekelompok penerjemah dwibahasa (Spanyol-Inggris) profesional kelas wahid yang dihormati secara luas. Asia Tenggara, sebagai sebuah kawasan, dan sebagai sekelompok negara yang berdiri sendiri-sendiri, tak memiliki yang seperti ini,” kata Anderson.

Namun, benarkah bahasa Indonesia yang termasuk salah satu bahasa nasional di Asia Tenggara akan selamanya tidak memiliki aura transnasional seperti dikatakan Ben

Anderson? Beberapa tahun belakangan ini terjadi perkembangan menarik, baik dari sastra Indonesia maupun dari perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Mengutip penulis dan penerjemah Anton Kurnia (*Jawa Pos*, 9 September 2018, hlm. 6), perubahan peta perbukuan global, perkembangan penerbitan independen, revolusi digital, keajaiban internet, serta upaya-upaya yang lebih serius dan ajek dalam penerjemahan teks-teks sastra membuat pertukaran karya dan wacana menjadi lebih meluas dan melampaui batas-batas sekaligus amat intens.

Dalam konteks Indonesia, kemajuan pesat itu juga terasa dan tampak. Kini para penulis Indonesia telah mulai mampu menembus persaingan ketat di pentas-pentas dunia. Salah satunya lewat novel-novel Eka Kurniawan. Karya para penulis Indonesia juga mulai dilirik dalam ajang perbukuan internasional. Indonesia menjadi tamu kehormatan pada Pameran Buku Internasional Frankfurt, Jerman, 2015. Prestasi yang sama akan kembali diulangi tahun depan, saat Indonesia menjadi *Market Focus Country* pada Pameran Buku Internasional London, Inggris, Maret 2019.

Perkembangan ini berdampak pada cara pandang kita dalam melihat posisi bahasa Indonesia. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat. Bahasa Indonesia terbukti mampu mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi modern dengan daya ungkap setara bahasa-bahasa besar lainnya. Hal ini tercermin dari mayoritas sastrawan Indonesia setia menggunakan bahasa nasional. Fakta bahasa modern ini juga tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia di bidang lain, seperti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni.

Kondisi ideal kebahasaan kita, sebagaimana digariskan UU Nomor 24 Tahun 2009, sepatutnya mengikhtiarkan terjadinya keseimbangan antara kebutuhan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Perimbangan itu dapat dicapai lewat kesadaran kolektif atas ketiga bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut.

Seiring dengan kemajuan bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga semakin penting. Ada sejumlah alasan untuk optimis pada peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sekarang ini pengajaran bahasa Indonesia di sejumlah negara justru tengah menemukan momentum terbaiknya. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik

di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, saat ini tercatat tidak kurang dari 45 lembaga penyelenggara pengajaran BIPA, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus. Di luar negeri, Pengajaran BIPA telah dilakukan oleh sekitar 130 lembaga tersebar di 36 negara. Lembaga-lembaga itu terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga kursus (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 1 Oktober 2018).

Di Taiwan, pengajaran bahasa Indonesia mendapat efek positif dari kebijakan Pemerintah Taiwan menerapkan *The New Southbond Policy*. Kebijakan baru ini resmi diluncurkan pada 5 September 2016 untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran berbagai kepentingan, termasuk ekonomi-perdagangan dan beasiswa pendidikan, antara Taiwan dengan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australasia. Salah satu implikasi dari kebijakan baru ini adalah berkembangnya penyelenggaraan mata kuliah bahasa dan budaya Indonesia pada sejumlah perguruan tinggi di Taiwan.

Pengajar kajian internasional Universitas Kanda, Jepang, Funada Kyoko mengungkapkan, di Jepang ada 75 dari 800 perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Funada Kyoko melihat peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal itu bisa dimulai dari kawasan ASEAN dan diiringi upaya menjadikan ekonomi Indonesia kokoh (*Kompas*, 18/2-2017).

Pengajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN juga menemukan momentumnya dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jumlah perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia di Thailand terus berkembang. Begitu pula di Vietnam. Bahkan sejak 2009, Pemerintah Daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, sudah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua.

Jadi, lewat sejumlah perkembangan menggembirakan ini, kita dapat masuk ke dalam tahapan yang lebih serius, yaitu menyiapkan strategi menyebarkan bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya.

PENGAJARAN BIPA DAN EKSPEDISI BUDAYA

Berbagai upaya telah dilakukan untuk penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA. Baik oleh pemerintah, organisasi profesi (APPBIPA), maupun perorangan (masyarakat). Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) secara berkala melakukan pengiriman tenaga

pengajar BIPA ke luar negeri. Pada tahun 2015 telah dikirim para pengajar BIPA sebanyak 80 orang. Negara yang dituju adalah Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Jerman, Prancis, Myanmar, Timor Leste, Australia, Amerika Serikat, Filipina, Mesir, Maroko, dan Tunisia (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 29 Januari 2017).

Kegiatan pengiriman tenaga pengajar BIPA mulai dilakukan Badan Bahasa sejak berdirinya PPSDK. Pada tahun 2018, Badan Bahasa menargetkan ada 115 pengajar BIPA yang akan dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga penyelenggara BIPA, dengan total pembelajar 10.600 orang asing (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> diunduh pada 2 Oktober 2018). Seleksi dan pelatihan bagi pengajar BIPA telah dilakukan PPSDK bekerja sama dengan Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA (APPBIPA).

Dari segi kuantitatif, peningkatan jumlah pengiriman pengajar BIPA ini mengembirakan. Namun, kita masih memiliki tugas mempersiapkan peningkatan kompetensi pengajar BIPA melalui pendidikan profesi guru BIPA, pembukaan program studi BIPA, dan sertifikasi guru BIPA. Ketiga program ini harus direncanakan matang dan berkelanjutan sehingga pengajaran BIPA menjadi pengajaran berkualitas yang diakui secara luas. Tentu saja harus ada dukungan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud). Rintisan program-program tersebut harus seizin Kemendikbud.

Untuk peningkatan kualitas pengajar BIPA, berbagai pelatihan telah dilakukan. Namun, hal tersebut tentu saja tidak cukup untuk diakui secara internasional. Dunia internasional akan selalu menuntut adanya sertifikat profesi bagi pengajar BIPA. Saat ini, belum ada lembaga sertifikasi untuk pengajar BIPA (LSP BIPA). Para pengajar BIPA masih berbekal ijazah sarjana, magister, doktor dengan berbagai latar belakang pendidikan. Keberagaman ini sudah seharusnya segera diselesaikan dengan berbagai program tadi (kualifikasi pendidikan BIPA atau LSP BIPA) sehingga profesionalisme pengajar menjadi jelas dan diakui negara lain.

Selain pengajaran BIPA, ekspedisi budaya menjadi satu terobosan yang harus dilakukan. Setakat ini para pengajar BIPA sudah banyak memasukkan unsur budaya dalam pengajarannya. Buku-buku BIPA yang diterbitkan PPSDK dan perorangan secara sadar mengintegrasikan pengenalan budaya dalam materi keterampilan berbahasa. Jika merujuk pada Koentjaraningrat (1980), unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan atas

tujuh klasifikasi, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Pada tahun 2015 penulis melakukan analisis kebutuhan kepada dua belas siswa BIPA tingkat pemula (A1) dan tiga belas pengajar BIPA tentang perlu atau tidaknya materi budaya diberikan. Dari kuesioner yang terkumpul diperoleh data sebagai berikut.

Data jawaban atas pertanyaan **materi apakah yang ingin dikuasai siswa:** sebanyak 100% menjawab ingin menguasai keterampilan berbahasa Indonesia. Jawaban atas pertanyaan **apakah siswa BIPA membutuhkan informasi tentang budaya di Indonesia:** sebanyak 92,3% membutuhkan dan 7,7% menyatakan tidak. Data jawaban atas pertanyaan **materi kebudayaan apa yang dibutuhkan siswa BIPA:** sebanyak 69,2% sangat membutuhkan materi ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia, 46% sangat membutuhkan materi tentang aktivitas masyarakat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia dan kebudayaan fisik (candi, rumah adat, dan lain-lain). Jika dikaitkan dengan teori Koentjaraningrat tampaknya masalah organisasi sosial menjadi hal yang lebih dominan dibutuhkan.

Selanjutnya, analisis kebutuhan yang dilakukan kepada tiga belas pengajar BIPA menghasilkan data berikut. Data jawaban dari pertanyaan **apakah siswa BIPA tingkat pemula menurut pengajar membutuhkan informasi tentang budaya di Indonesia:** semua pengajar menjawab setuju. Rinciannya, 75% pengajar menyatakan setuju karena materi budaya dibutuhkan agar siswa BIPA dapat beradaptasi dengan masyarakat Indonesia (tidak terjadi keterkejutan budaya); 12,5% pengajar setuju dengan alasan untuk menambah pengetahuan siswa asing soal budaya Indonesia; dan 12,5% pengajar setuju karena siswa asing tertarik dengan budaya Indonesia sehingga materi budaya menjadi materi yang harus dibahas juga di dalam pembelajaran.

Data jawaban pengajar tentang **materi kebudayaan yang dibutuhkan siswa BIPA tingkat A1:** 100% pengajar menyatakan siswa BIPA membutuhkan materi ide/nilai-nilai hidup sopan santun masyarakat Indonesia. Sebanyak 100% pengajar menyatakan siswa BIPA membutuhkan materi aktivitas masyarakat/kebiasaan masyarakat Indonesia, pengetahuan kebudayaan fisik seperti candi, rumah adat, dan lain-lain. Lalu, sebanyak 37,5% pengajar sangat membutuhkan informasi tentang kebudayaan fisik: candi, rumah adat, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dan pengajar sama-sama berpendapat materi budaya penting bagi siswa

BIPA. Materi yang paling diperlukan adalah materi ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia, aktivitas masyarakat/kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia, dan terakhir materi kebudayaan fisik (candi, rumah adat, dan lain-lain).

Menurut Suyitno (2005), pengembangan materi ajar BIPA harus memperhatikan empat aspek: (1) tingkat kesulitan, (2) tingkat produktivitas, (3) tingkat kompleksitas, dan (4) tingkat keberterimaan. Berpegang pada pendapat Koentjaraningrat, budaya yang dapat diberikan di luar bahasa adalah sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Para penulis materi ajar BIPA atau pengajar BIPA dapat memilih unsur budaya tersebut untuk masuk dalam materi ajar BIPA secara bergradasi.

Jika membicarakan aspek **tingkat kesulitan**, pengajar dapat memulai dari budaya sehari-hari yang mudah dilihat atau dikerjakan siswa BIPA. Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat di sekitar termasuk dalam kategori mudah. Mulai dari budaya memberi salam, menyapa, berkenalan, permisi, dan minta maaf. Dari sudut pandang aspek **produktivitas**, budaya berupa ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering dilakukan oleh masyarakat sangat perlu diberikan kepada siswa BIPA. Kebiasaan orang Indonesia berbasa-basi, kebiasaan makan dengan tangan di beberapa daerah, atau kebiasaan duduk bersila adalah beberapa contoh kebiasaan produktif yang dapat diinformasikan.

Untuk **aspek kompleksitas**, hal ini berhubungan erat dengan tingkat kesulitan yang telah dibicarakan sebelumnya. Misalnya, materi budaya suku Batak yang sangat khas dalam memandang kekerabatan dan hubungan pernikahan tentu lebih kompleks dibandingkan materi tentang kata sapaan kekerabatan secara umum yang dilakukan orang Indonesia. Dengan demikian, materi sapaan kekerabatan pada suku Batak mungkin bisa diberikan pada pelajar asing tingkat madya dan yang sedang belajar di Sumatera Utara.

Dalam hal aspek tingkat **keberterimaan**, pengajar BIPA harus cermat menyeleksi materi budaya yang diberikan agar sesuai dengan konteks di mana siswa belajar. Jika siswa belajar BIPA di luar negeri dan kita tidak tahu apakah dia akan bekerja atau studi di mana nantinya, budaya (ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia) yang diberikan hendaklah yang umum berlaku di Indonesia (budaya *mainstream*). Budaya ini berlaku umum dan

biasa dilakukan masyarakat Indonesia secara luas. Harapannya jika siswa tersebut pergi ke Indonesia, tidak akan terjadi kesalahpahaman budaya.

Contoh sederhana: siswa BIPA belajar di negaranya lalu diberikan muatan ide/nilai-nilai sopan santun masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Jawa Tengah, padahal dia akan tinggal di Jakarta. Masyarakat di Jawa Tengah jika mengatakan “permisi” saat melalui satu gang kecil pasti akan bersikap sedikit membungkuk sambil memosisikan jempol menyamping. Hal ini tidak biasa dilakukan orang di Jakarta. Kemungkinan siswa tersebut akan mengalami keterkejutan budaya saat bekerja di Jakarta.

Menurut penulis, budaya lokal tempat siswa BIPA belajar saat di Indonesia perlu diperkenalkan. Siswa asing yang belajar di Sumatera Barat perlu dikenalkan pada sapaan “Uda” dan “Uni” yang mengacu pada kakak laki-laki dan perempuan di daerah. Mereka yang belajar di daerah Jawa Barat diperkenalkan sapaan khas Jawa Barat (Teteh untuk kakak perempuan dan AA untuk kakak laki-laki). Bukan hanya masalah bahasa yang diperkenalkan, namun juga unsur nonlinguistik yang mengiringinya. Contohnya *gesture* saat berkenalan, saat bertegur sapa, berkomunikasi, ada daerah-daerah yang memiliki kebiasaan khas. Ketika hal ini diinformasikan dalam kelas, maka akan bermanfaat bagi siswa untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Pengajaran bahasa, sastra, dan budaya tersebut tidak selalu diajarkan di dalam kelas. Banyak metode yang dapat digunakan guru agar siswa BIPA tertarik belajar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui ekspedisi budaya. Ekspedisi budaya dalam konteks ini tidak hanya melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata budaya. Namun, lebih kepada memberi pengalaman budaya kepada para siswa BIPA dalam bentuk konkret dengan “teknik celup” (membuat siswa berada langsung dalam suatu situasi budaya). Misalnya, pada saat upacara perkawinan atau upacara keagamaan, siswa BIPA diminta hadir dan menyaksikannya. Penulis yakin hal ini sudah sering dilakukan para pengajar BIPA yang paham betapa berharganya pengalaman langsung dibandingkan hanya membaca teks tentang hal tersebut.

Menurut Richard dan Amato (2010), orang belajar bahasa asing memiliki berbagai tujuan sebagai berikut.

Tujuan integratif, jika para siswa ingin: a) dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia atau dalam negeri sendiri yang berbicara bahasa target; atau b) bertahan hidup di budaya lain di mana bahasa target adalah bahasa utama yang digunakan.

Tujuan instrumental, jika siswa ingin: a) melakukan perjalanan, belajar, atau bekerja di negara lain di mana bahasa target adalah bahasa utama yang digunakan; b) mempelajari bidang tertentu atau mendapatkan pekerjaan dalam lingkungan lokal mereka sendiri yang mengharuskan mereka menjadi bilingual, atau c) dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk pindah ke tingkat studi yang lebih tinggi.

Tujuan personal, jika siswa merasa bahwa belajar bahasa lain adalah pengetahuan yang menguntungkan dan memperkaya wawasannya karena memberikan perspektif baru yang menarik. Menurut Richard dan Amato, para siswa juga punya kemungkinan belajar bahasa asing dengan kombinasi tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks pembelajaran BIPA, para siswa asing memiliki kombinasi tujuan-tujuan tersebut. Tujuan tersebut tentunya menjadi perhatian para pengajar atau penyelenggara program BIPA. Tujuan yang berbeda akan berdampak pada silabus dan materi yang disiapkan. Materi bahasa, sastra, dan budaya tentu harus diseleksi sesuai kebutuhan dan memperhatikan empat aspek tadi.

FAKTOR PENDUKUNG

Sebenarnya, para pengajar BIPA dan Badan Bahasa memerlukan dukungan pihak lain untuk menjadikan penyebaran bahasa dan sastra Indonesia ini lebih berhasil, yaitu pihak industri kreatif. Bahasa Indonesia akan lebih memiliki magnet ketika industri kreatif kita seperti film, drama televisi, animasi, dan industri musik Indonesia menembus kancah dunia. Kita bisa berkaca pada keberhasilan Korea Selatan mengemas budaya populernya (*pop culture*) menjadi fenomena dunia yang disebut *Korean wave* ('gelombang Korea' atau *hallyu* dalam bahasa Korea).

Menurut Suryani (2014), *Korean wave* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan produk kebudayaan populer Korea Selatan yang berhasil diekspor ke negara-negara lain di wilayah Asia, Eropa, maupun Amerika. Melalui musik, film, dan produk industri hiburan seperti drama televisi, *Korean wave* menjual kebudayaan Korea Selatan yang memadukan kehidupan tradisional dan modern. *Korean wave* tidak saja sebatas berhasil memasarkan budaya Korea Selatan, namun mampu memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata Korea Selatan kepada publik di berbagai negara. Dalam kasus ini, *Korean wave* bukan lagi sekadar transfer budaya lintas-negara atau perluasan industri hiburan, namun telah menjadi instrumen 'kuasa lunak' (*soft power*) dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi.

Nye, Jr. dalam Suryani (2014) menjabarkan bahwa *soft power* suatu negara didasarkan pada tiga sumber utama: kebudayaan (*culture*) yang membuat negara tersebut menarik bagi pihak lain; nilai politik (*political values*) yang dianut negara tersebut; dan kebijakan luar negeri (*foreign policies*) yang membuat negara tersebut memiliki legitimasi dan otoritas moral. Kebudayaan sebagai salah satu sumber utama *soft power* dibagi menjadi dua jenis, yakni *high culture* (budaya adiluhung) seperti seni, sastra, dan pendidikan yang menarik perhatian elit tertentu, serta *pop culture* (budaya populer) yang berfokus pada produksi hiburan massal (*mass entertainment*).

Kesuksesan *Korean wave* juga berdampak positif pada peningkatan minat belajar bahasa Korea di luar negeri. Fakta ini pernah dilaporkan Matt Pickles dalam saluran publik Britania Raya, BBC. Pickles menulis artikel berjudul “*K-pop drives boom in Korean language lessons*” (<https://www.bbc.com/news/business/>, 11 Juli 2018).

Menurut artikel tersebut, menduniannya popularitas musik populer Korea (K-Pop) turut berkontribusi pada peningkatan minat belajar bahasa Korea di berbagai negara, antara lain AS, Kanada, Thailand, dan Malaysia. Situs penyedia pembelajaran bahasa, *Duolingo*, tahun lalu baru merilis kursus bahasa Korea. Dalam waktu singkat, program belajar bahasa Korea itu diminati 200.000 orang.

Terjadi peningkatan minat belajar bahasa Korea sebesar 14 % pada universitas-universitas AS sepanjang 2013—2016. Padahal, bahasa-bahasa lain mengalami penurunan jumlah peminat. Statistik terakhir mencatat jumlah 14.000 mahasiswa pembelajar bahasa Korea di AS. Bandingkan saat dua dekade sebelumnya, hanya 163 mahasiswa tertarik belajar bahasa tersebut.

Padahal, meminjam istilah Ben Anderson, bahasa Korea pun terbilang tidak memiliki aura transnasional karena hanya menjadi bahasa warga di Semenanjung Korea (Korea Selatan dan Korea Utara). Sementara cakupan bahasa Indonesia secara geografis lebih luas dibandingkan bahasa Korea.

Seperti kesuksesan Korea memopulerkan produk budaya dan bahasanya, Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama. Dua tahun lalu penulis bertemu para pengajar bahasa Melayu dari Malaysia dan Singapura dalam satu kegiatan pelatihan. Para pengajar bahasa Melayu tersebut dengan antusias bercerita tentang salah satu sinetron Indonesia yang mereka gandrungi. Mereka bercerita dengan lancarnya alur cerita sinetron tersebut hingga hafal pula nama para pemainnya. Penulis berharap, suatu

hari nanti budaya pop Indonesia pun dapat menembus batas, tidak hanya ke negara tetangga dekat kita seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei.

Kita harus berani bermimpi suatu saat nanti akan ada “*Indonesia wave*” seperti halnya Korean *wave* yang mampu menembus batas-batas negara nonbahasa Melayu. Tidak bisa tidak, pemerintah harus membuat berbagai kebijakan yang berdampak kepada *soft power* seperti halnya *Korean wave*. Keberhasilan pertunjukan seni budaya Indonesia dalam upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 yang dipuji negara lain, menjadi salah satu indikator bahwa kita juga mampu meraih apresiasi internasional. Sudah saatnya produk bahasa dan budaya Indonesia mendunia.

SIMPULAN

Penyebaran bahasa dan sastra Indonesia melalui pengajaran BIPA dan ekspedisi budaya akan berhasil jika didukung berbagai komponen. Komponen tersebut dapat dikategorikan atas komponen pengajaran dan nonpengajaran. Komponen pengajaran tentunya menjadi tugas para pengajar dan pegiat BIPA untuk terus meningkatkan mutunya. Para pengajar BIPA harus diberi kesadaran bahwa mereka bukan hanya sekadar mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia. Mereka adalah duta bahasa dan budaya Indonesia. Organisasi profesi APPBIPA harus bersinergi terus dengan pemerintah (Badan Bahasa) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan berbagai program peningkatan mutu tersebut.

Di sisi lain, ada faktor nonpengajaran yang harus segera digarap, yaitu faktor kebijakan yang mendukung terciptanya “gelombang Indonesia”. Gelombang tersebut harus diperjuangkan bersama oleh seluruh pihak terkait. Pemerintah dapat mendukung dengan memunculkan berbagai kebijakan yang membantu budaya Indonesia dapat lebih dikenal dunia. Penulis yakin, produk budaya seperti film, drama televisi, dan animasi, jika mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah akan meraih reputasi internasional dan berdampak pada peningkatan jumlah orang asing yang ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ben. (2013). *“The Unrewarded: Notes on the Nobel Prize for Literature”*, *New Left Review* 80, diterjemahkan Ronny Agustinus di www.sastraalibi.blogspot.com, (diunduh pada 28 September 2018).
- Koentjaraningrat. (1980). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kurnia, Anton. (9 September 2018). “Sastra yang Melampaui Tapal Batas”. *Jawa Pos*. Rubrik Budaya hlm. 6.
- Muliastuti, Liliana. (2017). “Budaya Indonesia dalam Pengajaran BIPA”. *Makalah*. Dalam: Seminar Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang ke-48 di Tenry University, 11 November 2017.
- Pusat Bahasa. (2010). *Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kemendiknas.
- Richard, Patricia A. dan Amato. (2010). “Putting It All Together: Some Practical Issues,” *Making It Happen From Interactive to Participatory Language Teaching: Evolving Theory and Practice Fourth Edition*. London: Pearson Longman.
- Siregar, Bahren Umar. (2011). *Peran Organisasi Profesi dalam Perencanaan Bahasa dalam Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Suryani, Ni Putu Elvina. *Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan*. Diunduh dari global.ir.fisip.ui.ac.id. Diakses pada 1 Oktober 2018.
- Suyitno, Imam. (2005). *Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Teori, Strategi, dan Aplikasi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- “Internasionalisasi Terkendala, Bahasa Indonesia diminati di Luar Negeri tetapi pengajar masih Kurang”. (*Berita*). *Kompas*, 18 Februari 2017, hlm. 12.
- <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id> (diunduh pada 29 Januari 2017).
- <https://www.bbc.com/news/business/> (diunduh pada 11 Juli 2018).